

PERAN ORGANISASI NON PEMERINTAH DALAM MITIGASI BENCANA (STUDI KASUS KELUARGA PEDULI PENDIDIKAN/KERLIP)

Siti Azizah Namirah

Abstract

This research discusses about Role of Non Government Organization (NGO) in Disaster Mitigation (Case Study Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan/KerLiP). Role of NGOs discussed in this research especially in disaster mitigation particular in non- structural mitigation and education of disaster risk reduction (DRR). This research uses qualitative approach and case study method. The result of the research shows KerLiP as NGO execute roles ini non-structural mitigation at the midlevel and macrolevel of intervetion.

Keywords : *Role of NGOs, Disaster Mitigation, Education of DRR.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasca tsunami yang terjadi di Asia yang menewaskan lebih dari 120.000 jiwa telah menjadi dekade Internasional untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana atau mitigasi bencana (Coppola, 2006). Menurut peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, "Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana".

Terdapat keterkaitan antara kesejahteraan sosial dan bencana, khususnya dalam pembangunan. Dimana saat terjadi dapat mempengaruhi pembangunan baik secara fisik maupun sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya suatu manajemen bencana yang baik dalam merancang pembangunan. Collins berpendapat aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh organisasi non pemerintah tidak hanya dalam hal tanggap darurat saat bencana terjadi, tetapi juga mulai mengintervensi dengan mengkaitkan antara pembangunan dengan bencana. Hal ini dikarenakan keberadaan organisasi non pemerintah dilatarbelakangi

oleh sistem pemerintahan yang kurang baik, melakukan perbaikan sistem, dengan praktik untuk jangka waktu yang lama dan aksi yang berkelanjutan. Oleh karena itu aktivitas organisasi non pemerintah khususnya dalam penanggulangan bencana harus beralih dari response menuju pada pendekatan pembangunan atau pengurangan risiko melalui program langsung di masyarakat ataupun advokasi (Collins, 2009).

Brenda DuBois & Karla K. Miley (2008) berpendapat pekerja sosial mendeskripsikan dirinya sebagai profesional - menolong orang lain menyelesaikan masalah dan menghasilkan sumber daya, menyediakan dukungan saat krisis, dan memfasilitasi respon sosial terhadap kebutuhan. Definisi di atas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara organisasi non pemerintah dan pekerjaan sosial. Hal ini membuat peran yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah secara umum berkaitan dengan peran yang dilakukan oleh pekerja sosial. Hal inilah yang menjelaskan peran organisasi non pemerintah melalui level intervensi dapat dijelaskan melalui peran yang dimiliki oleh pekerja sosial. Dalam melakukan perannya pekerja sosial membagi kliennya ke dalam tiga sistem level intervensi yaitu level mikro, level pertengahan, dan level makro (DuBois & Miley, 2008).

Mitigasi sendiri menurut Coppola (2006) terbagi atas dua jenis yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Dimana mitigasi secara struktural didefinisikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan konstruksi, keahlian tehnik, atau perubahan mekanik lainnya dalam mengurangi risiko dari konsekuensi/kemungkinan bahaya. Sedangkan mitigasi non struktural diartikan sebagai pengurangan risiko dari kemungkinan/konsekuensi melalui modifikasi kebiasaan manusia atau proses alami, tanpa melibatkan penggunaan keahlian teknik struktur. Dalam bagian ini hanya dijelaskan mengenai mitigasi non-struktural. Mitigasi non struktural sendiri didefinisikan oleh Coppola (2006), "Sebagai upaya untuk mengurangi kemungkinan/konsekuensi dari risiko melalui perubahan di kebiasaan manusia atau proses alamiah, tanpa melibatkan penggunaan dari keahlian teknik secara struktur (h.185). Teknik mitigasi non struktural adalah mekanisme yang sering digunakan dimana manusia beradaptasi dengan alam. Hal ini membuat mitigasi non struktural memakan biaya kecil dan cukup mudah dilakukan untuk masyarakat yang memiliki keuangan dan sumber daya yang minim. Menurut Coppola terdapat beberapa jenis mitigasi non struktural yaitu, regulasi peraturan/*regulatory measures*, penyadaran masyarakat dan program pendidikan/*community awareness and education programs*, perubahan fisik non struktural/*nonstructural physical modifications*, kontrol lingkungan/*environmental control*, dan perubahan kebiasaan/*behavioral modification*.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini mencoba menggambarkan mitigasi bencana yang dilakukan oleh Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan/ KerLip. Dalam rangka mengeksplorasi lebih dalam terkait peran KerLiP peneliti menggunakan studi kasus instrumen tunggal. Creswell (2002) menjelaskan terdapat empat

tipe dasar dalam prosedur pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumen-dokumen, dan material *audio visual*. Menurut Creswell (2002) cara menganalisa data dalam penelitian kualitatif ialah "proses analisa data termasuk membuat pemahaman dari data dokumen dan gambar. Hal ini termasuk mempersiapkan data untuk dianalisa, memahami data lebih dalam, merepresentasikan data, dan membuat sebuah intepretasi dari arti yang lebih luas dari data" (h.22).

2.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada September 2013 hingga Juni 2014. Secara umum mengambil lokasi pengumpulan data di KerLip yang berlokasi di Kanayakan, Kota Bandung, Jawa Barat. KerLiP dipilih sebagai tempat penelitian merujuk pada alasan antara lain :

- KerLiP ialah organisasi non pemerintah yang melaksanakan mitigasi bencana, khususnya pendidikan pengurangan risiko bencana.
- KerLiP merupakan organisasi non pemerintah yang tergabung dalam Konsorsium Pendidikan Bencana dan Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana. Hal ini menunjukkan bahwa KerLiP memiliki peran yang cukup signifikan khususnya mengenai pendidikan pengurangan risiko bencana di tingkat nasional.
- Program KerLiP memiliki peningkatan yang signifikan setiap tahunnya dalam aktivitas mitigasi bencana. Hal ini menunjukkan bahwa KerLiP berperan aktif dalam pengurangan risiko bencana.

2.2. *Sampling* dan Analisis Sampel

Dalam teknik pengambilan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Alasan teknik *purposive* diterapkan dalam penelitian ini adalah karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang ingin mengetahui informasi-informasi tertentu

secara mendalam dengan objek partisipan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Menurut Creswell (2002), "Prosedur pengambilan data yang paling tepat untuk metode kualitatif dilakukan secara *purposefully* dalam memilih informan (atau dokumen atau material visual) hal ini akan menjawab dengan baik pertanyaan penelitian" (h.22). Selanjutnya terdapat empat paramater informan menurut Miles dan Huberman (1994) dalam Creswell (2002), "Lokasi. Dimana peneliti melakukan penelitian; Aktor. Siapa yang akan diobservasi dan diwawancarai; dan Proses. Mengembangkan secara alamiah kegiatan yang dilakukan aktor di lokasi." (h.22).

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis informan yakni informan utama dan informan pendukung. Berikut merupakan kriteria pemilihan informan :

1. Ketua KerLiP. Hal ini dikarenakan posisi ketua sebagai penanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang dimiliki KerLiP dan perannya yang sangat penting bagi keberlangsungan program penyadaran masyarakat dan pendidikan.
2. Manajer program, hal ini dikarenakan setiap kegiatan yang berhubungan dengan mitigasi bencana maupun program penyadaran masyarakat dan pendidikan dikelola dan dikordinatori oleh manajer program secara langsung
3. Direktur Perkumpulan Skala, hal ini dikarenakan sebagai salah satu lembaga yang sering bekerja sama dengan KerLiP dan memiliki hubungan yang sangat baik hingga sekarang.
4. Direktur Pengurangan Risiko Bencana, BNPB. Hal ini dikarenakan dalam melakukan seluruh rangkaian programnya khususnya yang terkait mitigasi bencana KerLiP sering kali melibatkan pemerintahan turut serta dalam melakukan hal tersebut.
5. Siswa yang sekolahnya pernah diintervensi KerLiP dan sampai sekarang masih menjadi relawan aktif KerLiP. Selain itu penerima manfaat ini ialah relawan terbaik yang dimiliki dibuktikan dengan penghargaan yang telah diperoleh dalam

bidang pengurangan risiko bencana yaitu BNPB Awards.

6. Fasilitator KerLiP yang masih aktif dan didampingi KerLiP hingga menjalankan program sendiri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Coppola (2006) kesadaran untuk melakukan mitigasi khususnya di negara-negara berkembang timbul pada saat pasca tsunami tahun 2004 yang melanda beberapa negara di Asia yang menyebabkan lebih dari 12.000 orang menjadi korban jiwa. Selain itu FEMA (2005) dalam Coppola (2006) berpendapat bahwa pengurangan risiko bencana yang biasa disebut prevensi atau mitigasi dianggap sebagai landasan utama dalam manajemen bencana. Hal ini yang menyebabkan mitigasi bencana menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Chambers dan Conaway (1992) dalam Medury (2008) berpendapat dalam pembangunan berkelanjutan termasuk manajemen bencana khususnya mitigasi bencana diperlukan kerjasama yang baik antara lembaga, donor, pemerintah, termasuk organisasi non pemerintah. Collins (2009) memperkuat hal ini dengan berpendapat bahwa aktivitas yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah seharusnya tidak hanya dalam hal tanggap darurat saat bencana terjadi, tetapi juga mulai mengintervensi dengan mengkaitkan antara pembangunan dengan bencana. Hal ini dikarenakan kemunculan organisasi non pemerintah disebabkan oleh pemerintahan yang kurang baik di suatu tempat dan organisasi non pemerintah berperan dalam melakukan perbaikan sistem. Hal di atas memperkuat peran organisasi non pemerintah yang sangat signifikan dalam mitigasi bencana.

3.1. Laporan Penelitian

Model manajemen bencana di suatu daerah tidak sama karena disesuaikan dengan karakteristik wilayah ini. Collins (2009)

berpendapat bahwa dampak bencana yang ada ditentukan oleh seberapa tinggi pembangunan yang ada di wilayah tersebut. Hal inilah yang menjadikan KerLiP memiliki standar dan model intervensi yang berbeda untuk setiap target sasarannya. Pada praktiknya KerLiP memiliki dua program unggulan dalam mitigasi bencana dan pendidikan pengurangan risiko bencana yaitu Kampanye dan Advokasi Sekolah/Madrasah Aman SHIAGA dan GeMBIRA bersama KerLiP. Hal-hal inilah yang nantinya akan diketahui level intervensi yang dimiliki oleh KerLiP berada di level mikro, pertengahan, dan/atau makro. Serta peran apa yang dilakukan dalam masing-masing level tersebut. Hal ini berdasarkan pengelompokan yang dilakukan oleh DuBois & Miley (2008). Level Mikro yang berarti intervensi dilakukan pada keluarga dan individu, di sini agen perubah bisa berperan sebagai *enabler* yang berfungsi dalam membantu klien menemukan solusi, broker/advokat yang membantu klien dalam manajemen kasus, dan guru yang membantu klien dalam memproses/menerima informasi yang bermanfaat. Pada level pertengahan dimana intervensi dilakukan untuk kelompok formal dan organisasi, agen perubah dapat berperan sebagai fasilitator yang berfungsi dalam melakukan pengembangan organisasi, konvener/mediator yang berfungsi dalam mengembangkan jejaring klien dalam rangka mencapai tujuannya, dan pelatih yang berfungsi dalam memberikan kemampuan yang dibutuhkan klien secara profesional. Selanjutnya level makro ialah saat agen perubah melakukan intervensi untuk komunitas dan masyarakat, di sini agen perubah berperan sebagai perencana yang melakukan penelitian dan perencanaan demi tujuan penerima manfaat, aktivis yang melakukan aksi sosial sesuai isu yang dibutuhkan, dan *outreach* yang berfungsi dalam memberikan pendidikan kepada komunitas (DuBois & Miley, 2008).

3.2. Artikel Ulasan

Peran-peran di atas akan dianalisa melalui aktivitas mitigasi bencana non-struktural yang dilakukan oleh KerLiP. Coppola (2006)

membagi mitigasi bencana non-struktural kedalam lima jenis yaitu regulasi peraturan/*regulatory measures*, penyadaran masyarakat dan program pendidikan/*community awareness and education programs*, perubahan fisik non struktural/*nonstructural physical modifications*, kontrol lingkungan/*environmental control*, dan perubahan kebiasaan/*behavioral modification*.

- Peran dalam Regulasi Peraturan melakukan usaha pengurangan risiko bencana/mitigasi bencana salah satu upaya yang dilakukan oleh KerLiP ialah melalui regulasi peraturan. Regulasi peraturan yang dimaksud ialah, “Membatasi risiko bahaya melalui peraturan hukum yang ada” (Coppola, 2006h.185). Dalam rangka mengurangi risiko bencana melalui mitigasi bencana jenis ini KerLiP memiliki program bernama Kampanye dan Advokasi Sekolah/Madrasah Aman. Dalam melakukan advokasi dan kampanye KerLiP kerap bekerja sama dengan berbagai macam instansi dari lembaga pemerintah, lembaga privat, sesama organisasi non pemerintah hingga lembaga internasional. Hal terbaik dari usaha KerLiP dalam peran ini ialah saat membantu BNPB dalam menghasilkan Perka BNPB terkait pedoman penyelenggaraan sekolah aman. Selain itu KerLiP juga menjangkau Kemendikbud Subdit PK-LK untuk penyusunan pedoman PRB untuk SMLB. Program ini sudah ada sejak tahun 2007 dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Hal yang dilakukan KerLiP ini menurut Coppola (2006) masuk ke dalam regulasi dan standar kewanitaan. Dimana regulasi ini dibuat bertujuan untuk memberikan pedoman aktivitas dan praktik aman yang harus diterapkan.

Berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh, KerLiP dalam perannya melalui regulasi dan peraturan KerLiP telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan kota Bandung dalam kampanye sekolah aman. Tidak hanya di Bandung di Lampung Timur KerLiP juga berhasil melakukan advokasi untuk GSB Forum Anak yang dipertemukan Setjen Kemendikbud dan BNPB mengenai hasil analisa kerentanan yang dilakukan

forum anak tersebut. Selain itu di tingkat nasional bersama BNPB dan organisasi non pemerintah lainnya KerLiP juga turut membantu kampanye sekolah dan rumah sakit aman yang menjadi agenda internasional dari UNISDR. Lainnya hal fenomenal yang menjadi prestasi untuk KerLiP sendiri dalam advokasi mitigasi bencana ialah saat bersama lembaga lainnya berhasil mendorong lahirnya Perka BNPB No. 4 Tahun 2012 mengenai pedoman penerapan sekolah aman.

Merujuk dari apa yang dikatakan oleh DuBois & Miley (2008) intervensi yang dilakukan KerLiP melalui regulasi peraturan masuk ke dalam level intervensi makro dan pertengahan. Level pertengahan pekerjaan sosial ialah pekerja sosial yang berinteraksi dengan kelompok formal dan kompleksitas organisasi. Kompleksitas organisasi yang dimaksud termasuk dengan lembaga layanan sosial, organisasi pelayanan kesehatan, sistem pendidikan, dan fasilitas lembaga pemasyarakatan (DuBois & Miley, 2008). Sedangkan Level makro ialah pekerja sosial yang bekerja dengan lingkungan, komunitas, dan masyarakat untuk mencapai suatu perubahan sosial (DuBois & Miley, 2008). Dalam regulasi peraturan ini karena KerLiP telah melakukan advokasi di tingkat nasional dan daerah melalui berbagai media dan berjejaring dengan banyak lembaga untuk kepentingan sekolah secara khusus maupun secara umum maka KerLiP berperan sebagai konvener/mediator, aktivis, dan *outreach*.

Konvener dan mediator ialah agen perubah yang bertindak dalam sebagai perantara antar perwakilan kelompok dalam melakukan identifikasi masalah, merancang tujuan, dan segala sesuatu yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah ataupun perselisihan yang nantinya akan diadvokasi dan didorong menjadi suatu ketetapan sosial. Peran KerLiP sebagai konvener/mediator terlihat pada saat KerLiP mendapatkan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dimana inti dari peran ini ialah menjadi perantara antara penerima manfaat

dan pemangku kepentingan untuk kelompok formal dan organisasi. Pada praktiknya KerLiP menjadi perantara antara sekolah di Bandung yang memerlukan pendidikan PRB dengan pemerintah Bandung selaku pemangku kepentingan.

KerLiP dapat disebut sebagai organisasi non pemerintah yang berperan sebagai aktivis karena Perka BNPB yang telah berhasil dihasilkan bersama lembaga lainnya. Hal ini dikarenakan melalui peraturan ini berarti telah berhasil melakukan inisiasi perubahan sosial melalui pembuatan peraturan baru terkait sekolah aman. Aktivis sendiri diartikan sebagai agen perubah yang menginisiasi perubahan sosial melalui perubahan institusional dengan cara penggantian kekuasaan maupun pengaturan sumber daya.

Peran lain yang dilakukan KerLiP dalam regulasi peraturan ialah bertindak sebagai *outreach*. *Outreach* sendiri ialah peran yang dilakukan oleh agen perubah dengan cara mengajarkan masyarakat mengenai isu sosial yang berkembang, ketidakadilan yang mungkin terjadi, dan layanan sosial apa yang seharusnya didapatkan oleh para penerima manfaatnya. Hal ini terkait dengan apa yang dilakukan dalam membantu kampanye sekolah dan rumah sakit aman. Kampanye ini ialah kampanye tingkat dunia yang dipimpin oleh UNISDR dan KerLiP membantu BNPB dalam mengimplementasikan kampanye tersebut.

- Peran dalam Penyadaran Masyarakat dan Pendidikan.

Dalam melakukan perannya melalui penyadaran masyarakat dan pendidikan KerLiP kerap melakukan pelatihan fasilitator dan *roadshow* untuk menyebarkan nilai-nilai mitigasi bencana secara masif. Penyadaran masyarakat dan program pendidikan dalam mitigasi bencana sendiri adalah salah satu hal yang sangat krusial dalam upaya mengurangi risiko bencana. Hal ini seperti apa yang dikemukakan Coppola (2006) bahwa masyarakat dapat melindungi

diri mereka dari terpapar bahaya jika sebelumnya mereka sudah diinformasikan mengenai bahaya yang mungkin terjadi dan dilatih bagaimana mengurangi dan menghadapi bahaya yang mungkin terjadi tersebut. Kegiatan ini dilakukan melalui sub program yang biasa disebut *YES for Safer School/Madrasaa*. Kegiatan ini sudah menjangkau daerah Jawa Barat, Jakarta, Bogor, Lampung, Sumatera Utara, NTB, dan daerah lainnya. Selain itu kampanye SESSAMA yang dilakukan KerLiP pada 2013 merupakan suatu gerakan untuk mengkampanyekan simulasi evakuasi untuk seluruh sekolah di Indonesia melalui berbagai macam media. Hal ini menunjukkan KerLiP pada bidang ini menunjukkan KerLiP berperan sebagai fasilitator, pelatih, dan *outreach*.

KerLiP yang berperan sebagai fasilitator terkait dengan pendampingannya di sekolah-sekolah untuk melakukan analisa kapasitas dan kerentanan hingga simulasi evakuasi. Ciri seorang fasilitator ialah mendorong, memberi masukan dan informasi, serta menuntun penerima manfaatnya mencapai suatu tujuan tertentu. Hal ini sama seperti apa yang dilakukan oleh KerLiP yang mendampingi sekolah-sekolah untuk menuju sekolah aman.

KerLiP menjadi pelatih bagi teman-teman fasilitator STKS dan Ismakes khususnya. Sebagai pelatih KerLiP kerap membuat pelatihan untuk fasilitator yang bertujuan nantinya mendampingi sekolah-sekolah yang ada di sekitar lingkungannya untuk mencapai sekolah aman. Hal ini dikarenakan KerLiP sebagai agen perubah memberikan pelajaran kepada lembaga formal dalam hal ini sekolah melalui *workshop* dan pengembangan keterampilan khususnya dalam mitigasi bencana.

Selanjutnya pendidikan sosial khususnya mitigasi bencana yang dilakukan KerLiP melalui berbagai macam media melalui *YES for Safer School/Madrasaa*. Hal ini menunjukkan KerLiP berperan sebagai *outreach* untuk menyebarkan secara masif pentingnya simulasi evakuasi khususnya

di sekolah. Dalam hal ini pentingnya penyebaran simulasi evakuasi dianggap sebagai sesuatu isu sosial yang harus disebarkan secara masif.

- Peran dalam Perubahan Fisik Non-Struktural.

Berdasarkan hasil temuan lapangan yang didapatkan belum ditemukan peran KerLiP yang signifikan dalam bidang ini.

- Peran dalam Kontrol Lingkungan.

Berdasarkan hasil temuan lapangan yang didapatkan belum ditemukan peran KerLiP yang signifikan dalam bidang ini.

- Peran dalam Perubahan Kebiasaan.

Perubahan kebiasaan merupakan salah satu jenis mitigasi bencana non-struktural yang berfungsi dalam mengurangi risiko bencana. Melalui perubahan kebiasaan ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh keuntungan salah satunya ialah terhindar dari bahaya yang mungkin terjadi. Dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana/mitigasi bencana KerLiP juga turut berperan dalam melakukan perubahan kebiasaan untuk target sasarannya. Pada peran ini KerLiP melakukan kegiatan jamban bersih, sehat, jujur, membentuk komunitas *zero waste event*, cuci tangan pakai sabun, dan hari bebas kendaraan bermotor. Jamban bersih sehat jujur adalah program yang dirancang untuk para siswa dalam menjaga kebersihan kamar mandi di sekolahnya, hal ini bertujuan untuk melakukan upaya preventif terhadap penyakit yang mungkin timbul dari jamban. Hal tersebut serupa dengan cuci tangan pakai sabun yang bertujuan untuk mencegah kuman penyakit. Sedangkan *zero waste event* sendiri bertujuan mengurangi dan mendaur ulang sampah. Hal ini bertujuan untuk memerangi bencana banjir dan dampak pemanasan global. Hal lainnya ialah dengan pengembangan model hari bebas kendaraan bermotor dimana KerLiP melakukan kampanye agar masyarakat Bandung turut serta dalam

kegiatan ini. Kegiatan kampanye hari bebas kendaraan bermotor bertujuan untuk mengurangi jumlah gas emisi yang ada di udara yang dapat menimbulkan efek rumah kaca bagi bumi. Kegiatan di atas menurut Coppola (2006) termasuk dalam konservasi lingkungan, dimana kegiatan-kegiatan di atas bertujuan dalam menjawab dilematis pembangunan khususnya perkotaan yang menyebabkan masalah sampah dan polusi khususnya.

Terkait dengan peran yang dilakukan oleh KerLiP dalam hal ini KerLiP berada pada level pertengahan. Karena pada praktiknya KerLiP melakukan intervensi untuk sekolah. Terkait aktivitas dan kegiatan yang dilakukan KerLiP berperan sebagai fasilitator bagi sekolah tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan KerLiP membantu anak-anak sekolah untuk melakukan asesmen terkait kerentanan dan kapasitas sekolahnya terhadap bencana. Lalu berkembang menjadi kegiatan dalam bidang lingkungan dan kesehatan yang dilakukan oleh para siswa dengan dukungan dari pihak sekolah. Hal ini menunjukkan KerLiP senantiasa menjadi pendorong

dalam mempertemukan *stakeholder* yang ada di sekolah tersebut.

Berdasarkan temuan lapangan dan pembahasan yang diperoleh di atas, terlihat bahwa KerLiP berperan dalam level pertengahan dan makro. Diantara kedua level ini KerLiP sebagai agen perubah lebih menonjol dalam level makro dibandingkan dengan level pertengahan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang mengapresiasi KerLiP dalam perannya di level makro. Disisi lain dalam level pertengahan terlihat kurang adanya keberlanjutan program dengan pencapaian yang kurang maksimal terbukti dengan banyaknya varian program yang berbeda di setiap level pertengahan yang di intervensi oleh KerLiP.

Dari berbagai macam peran organisasi non pemerintah yang ada dalam pengurangan risiko bencana pengetahuan dan pendidikan menurut UNISDR (2006) merupakan salah satu dari 3 inisiasi utama yang dilakukan oleh organisasi pemerintah. Coppola (2006) menyatakan, "Masyarakat sangat mampu untuk melindungi dirinya dari dampak bahaya

Tabel 1. Peran KerLiP dalam Mitigasi Bencana

Mitigasi Bencana Non-Struktural	Peran dan Level Intervensi KerLiP									Keterangan
	Mikro			Pertengahan			Makro			
	E	B/A	G	F	K/M	PL	PR	A	O	
Regulasi Peraturan	-	-	-	-	X	-	-	X	X	Perka BNPB, implementasi kampanye sekolah dan rumah sakit aman, bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk sekolah.
Perubahan Fisik Non-Struktural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Edukasi dan Program Penayadaran Masyarakat	-	-	-	X	-	X	-	-	X	Pelatihan fasilitator, kegiatan <i>YES at School/Madrasaa</i>
Kontrol Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perubahan Kebiasaan	-	-	-	X	-	-	-	-	-	<i>Zero waste event</i> , jamban bersih, sehat jujur, cuci tangan pakai sabun, <i>car free day</i>

Keterangan Tabel 1:

- E : Enabler
- F : Fasilitator
- PR : Perantara
- B/A : *Broker/Advokasi*
- K/M : *Konvener/Mediator*
- A : Aktivist
- G : Guru
- PL : Pelatih
- O : *Outreach*

Sumber : Dari berbagai sumber

jika mereka diinformasikan terlebih dahulu mengenai bahaya apa yang ada, lalu diajarkan apa yang harus mereka lakukan untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi (h.186). Selain itu pembangunan pendidikan bisa memfasilitasi masyarakat untuk membangun kepedulian terhadap kekurangan dan kelebihan yang dimiliki sekarang. Oleh karena itu seharusnya terkait manajemen kebencanaan menjadi bagian dari kurikulum di sekolah.

Pendidikan PRB merupakan salah satu konsentrasi utama KerLiP selain advokasi. Sudah sangat banyak sekolah maupun lingkungan masyarakat yang diberikan edukasi hingga pembuatan sistem peringatan dini dan peta risiko. Hal terbaik dari pendidikan PRB yang dilakukan KerLiP ialah apa yang dilakukan pada SMP 11 di Bandung. Dari hasil intervensi yang dilakukan selain sekolah memiliki jalur evakuasi tetapi juga mampu membuat salah satu murid di sekolah ini menjadi agen perubah yang berpengaruh dalam penyebaran pendidikan PRB yang dibuktikan diterimanya penghargaan dari BNPB.

- Peran dalam Edukasi Masyarakat.

Dalam program penyadaran masyarakat dan edukasi salah satu hal yang harus diperhatikan ialah edukasi masyarakat tersebut. Dimana Coppola (2006) menjelaskan bahwa edukasi masyarakat adalah hal yang harus dipertimbangkan dalam mitigasi dan kesiapsiagaan. Hal ini dikarenakan penginformasian kepada masyarakat adalah tindakan tepat yang digunakan untuk mengurangi risiko masyarakat sebelum bencana terjadi. Hal ini bertujuan agar masyarakat sudah terlatih dalam menghadapi situasi tanggap darurat. Aktivitas KerLiP dalam melakukan edukasi masyarakat ialah melalui pelatihan fasilitator dan *roadshow/kampanye*.

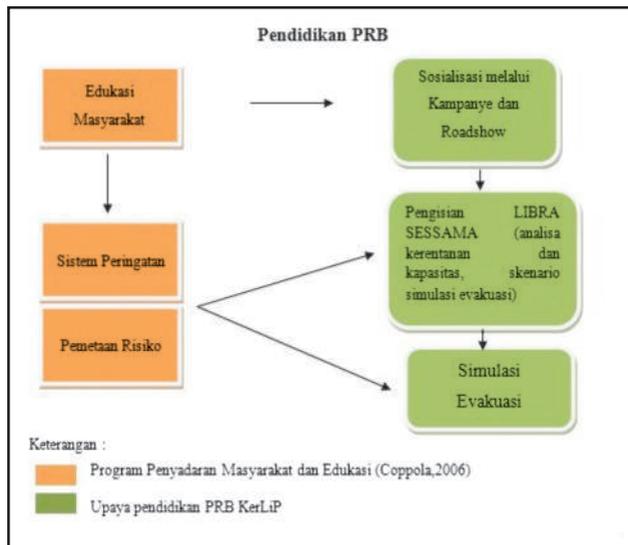
Pelatihan fasilitator ialah salah satu cara KerLiP dalam menjaring relawan untuk menjangkau sekolah-sekolah maupun lingkungan masyarakat dalam

rangka sosialisasi maupun pendampingan terkait pendidikan PRB secara lebih masif. Pelatihan pernah dilakukan di STKS dan tempat lainnya beberapa kali. Pada pelatihan ini para mitigasi bencana melalui sektor pendidikan merupakan salah satu dari amanah HFA (*Hyogo Framework for Action*). Hal ini menunjukkan bahwa program penyadaran masyarakat dan edukasi adalah salah satu bagian penting dalam mitigasi bencana. Hal tersebut membuat KerLiP fokus dalam program penyadaran masyarakat dan edukasi khususnya di sekolah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Collins (2009), menjelaskan bahwa bencana dan calon fasilitator diajarkan mengenai pembuatan rencana kontijensi sederhana melalui LIBRA.

Roadshow/kampanye sekolah aman yang dilakukan oleh KerLiP ialah salah satu kegiatan utama KerLiP dalam edukasi masyarakat. Bentuk kegiatan dapat berupa sosialisasi ataupun pendampingan tergantung kesepakatan yang diperoleh dari target sasaran.

- Peran dalam Sistem Peringatan.

Komponen lainnya dalam program penyadaran masyarakat dan edukasi ialah sistem peringatan. Coppola (2006) menyatakan bahwa sistem peringatan menginformasikan masyarakat saat risiko bahaya akan datang sehingga dapat melakukan perlindungan. Platform PBB untuk promosi sistem peringatan dini menyatakan terdapat empat faktor terpisah yang diperlukan untuk peringatan dini yang efektif yaitu; pengetahuan utama dari risiko yang dihadapi masyarakat; *monitoring* teknis dan layanan peringatan untuk risiko tersebut; penyebaran peringatan yang mudah dipahami dari risiko tersebut; dan pengetahuan masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan dan kapasitas menghadapinya. Hal ini menjadi satu kesatuan dalam rencana kontijensi. Hal inilah yang membuat KerLiP turut memperjuangkan rencana kontijensi untuk target sarannya melalui LIBRA.



Gambar 1. Peran Kerlip dalam Pendidikan PRB
Sumber: Hasil olahan penelitian

- Peran dalam Pemetaan Risiko.

Salah satu komponen penting dari program penyadaran dan edukasi terkait upaya pengurangan risiko bencana ialah melalui pemetaan risiko. Coppola (2006) menyatakan pemetaan risiko dilakukan untuk menunjukkan komponen-komponen kemungkinan dan konsekuensi kedalam format fisik peta dengan bentuk berdasarkan pada bahaya spesifik atau dari kumpulan bahaya. Oleh karena itu pemetaan risiko menjadi salah satu perhatian KerLiP dalam melakukan program penyadaran dan edukasi yang dilakukan oleh KerLiP. Kegiatan yang berkaitan dengan pemetaan risiko ialah seperti pembuatan jalur evakuasi, titik kumpul, denah sekolah aman hingga melakukan praktik simulasi bencana dan sosialisasi hasil pembuatan rencana kontijensi.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran organisasi non pemerintah dalam mitigasi bencana khususnya dalam pendidikan pengurangan

risiko bencana, hal tersebut adalah yang dilakukan oleh Perkumpulan KerLiP. Peran organisasi non pemerintah dalam mitigasi bencana berada pada semua level mulai dari mikro, pertengahan, hingga makro tergantung level intervensi dari organisasi non pemerintah tersebut. KerLiP sendiri berada pada level pertengahan dan makro. Level-level tersebut menginterpretasikan peran-peran yang dilakukan baik fungsi konsultasi, manajemen sumber daya, hingga pendidikan. Peran-peran ini berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah tersebut.

5. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan data-data yang diperoleh, KerLiP adalah organisasi non pemerintah besar yang cukup mapan. Namun perlu perbaikan dalam hal-hal berikut :

1. Berdasarkan temuan yang diperoleh terdapat banyak varian program yang tidak termasuk dalam program inti KerLiP. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya kegiatan yang berakibat pada kurang optimalnya peran KerLiP khususnya

- pada level pertengahan. Oleh karena itu diperlukan perbaikan bentuk program khususnya yang berkaitan dengan PRB.
2. Ditemukan pengalaman KerLiP dalam dunia PRB khususnya kurang didokumentasikan dengan baik, sesungguhnya dengan dokumentasi ini bisa menjadi pelajaran yang baik dalam KerLiP melaksanakan fungsinya baik di level pertengahan maupun level makro. Dokumentasi ini berfungsi sebagai alat evaluasi KerLiP sebagai agen perubah dan berfungsi sebagai pengembangan perannya sebagai fasilitator, konvener/mediator, pelatih, maupun aktivis. Oleh karena itu diperlukan manajemen dokumen yang lebih baik.

UNISDR. (2010). *Terminologi Pengurangan Risiko Bencana*. Bangkok: Asian Disaster Reduction and Response Network (ADRRN).

Zastrow, C. (2008). *The Practice of Social Work*. Chicago: Dorsey Press.

DAFTAR PUSTAKA

- Anheier, H. K. (2005). *Nonprofit Organizations Theory, Management, Policy*. New York: Routledge.
- Ashman & Karen, K, Kirst. (2010). *Introduction to Social Work and Social Welfare*. CA: Brooks/Cole.
- Collins, A. E. (2009). *Disaster and development*. Routledge.
- Coppola, D. P. (2006). *Introduction to International Disaster Management*. Butterworth- Heinemann.
- Creswell, J. W. (2006). *Qualitative Inquiry & Research Design : Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publications.
- DuBois, B., & Miley, K. K. (2008). *Social Work An Empowering Profession*. Boston: Pearson A and B.
- Medury, U. (2008). *Toward Disaster Resilient Communities: A New Approach for South Asia and Africa*. In J. Pinkowski, *Disaster Management Handbook* (h. 337-354). Florida: CRC Press.
- Triutomo, S., Widjaja, B. W., Sugiharto, R., BP, S., & Kristanto, Y. (2011). *Panduan Perencanaan Kontijensi Menghadapi Bencana (edisi kedua)*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana